

PENGARUH DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KAWASAN TIMUR INDONESIA

Muliana
Universitas Fajar
Email: muliana@unifa.ac.id

Abstract:

This study aims to analyze the effect of Regional Original Revenue (PAD) and Regional Expenditure on Economic Growth in Eastern Indonesia. The research focuses on four provinces: East Nusa Tenggara, Maluku, West Papua, and Papua, covering the period from 2013 to 2023. Employing a quantitative approach, this study applies multiple linear regression to assess the relationships among variables. The statistical analysis reveals that partially, PAD has a positive and significant impact on economic growth, although its contribution is relatively small. In contrast, regional expenditure shows a strong and highly significant influence and emerges as the most dominant variable in driving economic growth in the region. Simultaneously, PAD and regional expenditure jointly have a significant effect on regional economic growth. These findings reinforce the view that fiscal decentralization can promote economic growth when supported by strong local fiscal capacity and efficient public spending. In the context of Eastern Indonesia, which continues to face structural disadvantages, this study offers critical implications for local governments to improve fiscal independence through PAD optimization and ensure that regional expenditures are allocated to productive sectors such as infrastructure, education, and health. Strengthening the quality of local fiscal governance is essential to reduce interregional disparities and foster inclusive economic development in lagging regions.

Keywords: Local Own-Source Revenue, Regional Expenditure, Economic Growth

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Fokus penelitian diarahkan pada empat provinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua



Barat, dan Papua selama periode 2013–2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode regresi linear berganda untuk menguji hubungan antara variabel. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa secara parsial, PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun kontribusinya relatif kecil. Sementara itu, belanja daerah terbukti memiliki pengaruh positif dan sangat signifikan serta menjadi variabel yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Secara simultan, PAD dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa desentralisasi fiskal mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi apabila didukung oleh kapasitas fiskal daerah yang kuat dan belanja publik yang efektif. Dalam konteks kawasan timur Indonesia yang masih menghadapi ketertinggalan struktural, hasil penelitian ini memberikan implikasi penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi PAD, serta memastikan alokasi belanja daerah diarahkan pada sektor-sektor produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Peningkatan kualitas tata kelola fiskal lokal menjadi kunci dalam mengurangi ketimpangan antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di kawasan tertinggal.

Kata kunci : PAD, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Desentralisasi merupakan salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi sektor publik, tata kelola pemerintahan yang baik, dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Desentralisasi dipercaya sebagai kebijakan dan solusi atas persoalan ekonomi dan politik (Bahl 1999). Implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia dimulai sejak tahun 2001 yang ditandai dengan peningkatan jumlah dana transfer yang sangat tinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu sebesar 145,06% dari Rp33,07 triliun (2000) menjadi Rp81,05 triliun (2001). Dalam dua dekade implementasinya, jumlah dana transfer meningkat signifikan dari Rp81,05 triliun (2001) menjadi Rp812,97 triliun (2019) dan sedikit menurun di tahun 2020 menjadi Rp762,54 triliun sebagai dampak pandemi Covid-19 (Pahlevi et al. 2021). Teori desentralisasi fiskal yang dikemukakan Oates (1999) menekankan bahwa desentralisasi akan lebih efisien dalam penyediaan layanan publik dan pengalokasian sumber daya apabila pemerintah daerah memiliki informasi yang lebih baik mengenai kebutuhan lokal. Dalam konteks ekonomi regional, Romer (1994) menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi jangka panjang didorong oleh faktor-faktor internal dalam perekonomian, bukan hanya dari faktor eksternal.

Dua pilar utama desentralisasi fiskal, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Daerah, diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, hingga saat ini, hasil implementasi desentralisasi fiskal masih menunjukkan ketimpangan, terutama di kawasan timur Indonesia yang relatif tertinggal dibanding kawasan barat dalam hal pembangunan ekonomi dan infrastruktur. Studi empiris Setiawan and Aritenang (2019) menunjukkan bahwa peningkatan PAD dan transfer pusat tidak secara otomatis meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah apabila tidak disertai dengan efisiensi belanja dan kapasitas kelembagaan lokal yang memadai. Pertumbuhan ekonomi merupakan tujuan utama pembangunan daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya fiskal, termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah. PAD berperan sebagai indikator kemandirian fiskal, sementara belanja daerah mencerminkan kapasitas pemerintah dalam menyediakan layanan publik dan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi.

Namun, kontribusi PAD terhadap pertumbuhan ekonomi masih sering diperdebatkan, mengingat strukturnya yang sebagian besar bersumber dari pajak daerah dengan basis yang sempit. Sebaliknya, belanja daerah diyakini memiliki dampak yang lebih langsung melalui pembiayaan pembangunan dan penciptaan lapangan kerja. Temuan Mulyani et al., (2021) menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara PAD terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti semakin tinggi pendapatan asli daerah maka pertumbuhan ekonomi meningkat. Peningkatan PAD diperlukan dengan memaksimalkan sumberdaya yang dimiliki, agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah melalui alokasi belanja modal pada APBD. Disisi lain, temuan Fitriyani et al., (2020), Jannah et al., (2022) belanja daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. sedangkan Wiguna et al., (2021) mengemukakan bahwa belanja daerah khususnya belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kawasan timur Indonesia, yang mencakup provinsi seperti Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara, memiliki tantangan struktural yang kompleks, termasuk terbatasnya basis ekonomi lokal, rendahnya kualitas belanja pembangunan, serta ketergantungan tinggi terhadap transfer dari pemerintah pusat. Berdasarkan temuan Soleh (2015) secara umum Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta beberapa daerah yang tergabung dalam kawasan tersebut termasuk dalam kategori daerah tertinggal. Meskipun Dana Perimbangan menyumbang lebih dari 60% struktur APBD di sebagian besar daerah di wilayah timur, kontribusinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) cenderung stagnan. Hal ini mengindikasikan perlunya telaah lebih lanjut terkait

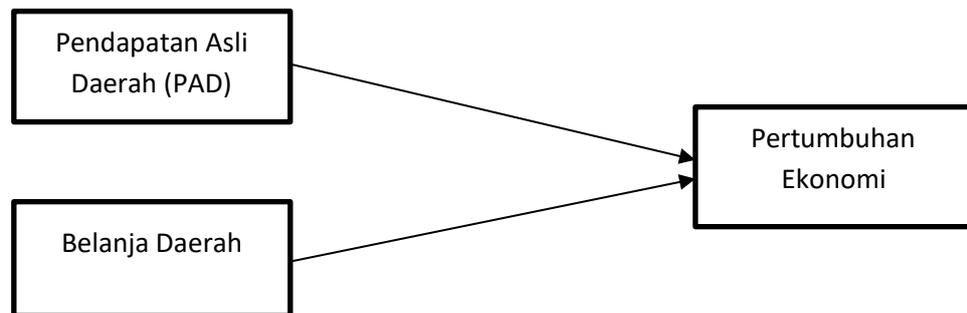
bagaimana pilar desentralisasi fiskal tersebut berdampak secara dinamis terhadap pertumbuhan ekonomi regional. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya di kawasan timur Indonesia yang memiliki karakteristik fiskal dan geografis yang unik.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatory dengan menggunakan data-data kuantitatif. Penelitian ini menjelaskan tentang hubungan dan pengaruh dari variabel-variabel yang diteliti, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia, disajikan pada gambar dibawah ini:

Gambar 1. Kerangka Pikir



Sumber: diolah peneliti (2025)

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif atau data yang berbentuk angka. Data kuantitatif pada penelitian ini berupa data Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia yang terdiri dari 4 propinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua. Data pada penelitian ini diperoleh dari sumber sekunder. Data sekunder pada penelitian ini diperoleh dari dokumen dan arsip yang terdapat pada website Kementerian keuangan dan Badan Pusat Statistik (BPS) yang sudah dipublikasikan.

Teknik pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen dan arsip yang terkait permasalahan penelitian, yaitu data Pendapatan Asli Daerah, belanja

daerah dan pertumbuhan ekonomi pada 4 propinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua Barat dan Papua selama periode tahun 2013-2023.

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan teknik analisis regresi linear berganda menggunakan software SPSS versi 27. Analisis ini dimaksud untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), belanja daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Pengujian yang dilakukan yaitu pengujian hipotesis parsial (uji t), uji koefisien determinan serta uji simultan.

PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Data penelitian mencakup 44 observasi dengan variabel PAD, Belanja Daerah, dan Pertumbuhan Ekonomi. Nilai rata-rata PAD dan Belanja Daerah menunjukkan peningkatan seiring waktu, sementara pertumbuhan ekonomi bervariasi antarperiode.

Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan uji regresi, terlebih dahulu dilakukan Uji Asumsi Klasik. Hasil uji asumsi klasik menunjukkan residual terdistribusi normal, scatterplot acak, dan tidak terdapat multikolinearitas ($VIF < 10$).

1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi sederhana dalam penelitian ini digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Belanja Daerah (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi dengan bantuan aplikasi SPSS versi 27, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-18.226	1.979		-9.209	.000

PAD	.145	.068	.131	2.131	.039
Belanja daerah	1.059	.075	.866	14.140	.000

Sumber: Output SPSS versi 27 (data diolah), 2025

Berdasarkan tabel tersebut, maka persamaan regresi linear berganda pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta X_1 + \beta X_2 + e$$

Persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

2. Uji Hipotesis Parameter Parsial (Uji-t)

a. Konstanta (Constant)

Nilai konstanta sebesar -18.226 dengan signifikansi $p < 0.001$. Artinya, jika *PAD* dan *Belanja Daerah* dianggap bernilai nol, maka *Pertumbuhan Ekonomi* diperkirakan bernilai negatif (-18.226). Nilai ini lebih bersifat matematis, bukan interpretasi ekonomi langsung, karena secara nyata *PAD* dan *belanja daerah* tidak mungkin nol.

b. Pengaruh *PAD* terhadap pertumbuhan ekonomi

Koefisien unstandardized $B = 0.145$ dengan nilai $p = 0.039$ (< 0.05). Artinya, setiap kenaikan 1 satuan *PAD* akan meningkatkan *Pertumbuhan Ekonomi* sebesar 0.145 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien Beta terstandarisasi sebesar 0.131 menunjukkan bahwa pengaruh *PAD* terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil dibandingkan variabel lainnya. *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, meskipun kontribusinya relatif kecil.

c. Pengaruh *Belanja Daerah*

Koefisien unstandardized $B = 1.059$ dengan nilai $p < 0.001$, yang berarti signifikan secara statistik. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 satuan *Belanja Daerah* akan meningkatkan *Pertumbuhan Ekonomi* sebesar 1.059 satuan, dengan asumsi variabel lain tetap. Koefisien Beta terstandarisasi 0.866 jauh lebih besar dibandingkan *PAD*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *Belanja Daerah* memiliki pengaruh dominan terhadap pertumbuhan ekonomi. *Belanja Daerah* berpengaruh positif, sangat signifikan, dan menjadi faktor yang paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

3. Uji Simultan (uji F)

Uji simultan atau uji F digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen dalam penelitian ini variabel *Pendapatan Asli Daerah (PAD)* dan *Belanja Daerah* secara

bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Dengan kata lain, uji simultan mengevaluasi apakah model regresi yang dibangun secara keseluruhan layak digunakan untuk menjelaskan variasi dari variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian koefisien regresi dengan bantuan aplikasi SPSS versi 27, diperoleh hasil yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Hasil Uji Simultan (Uji F)

		ANOVA ^a				
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	12.842	2	6.421	176.215	.000 ^b
	Residual	1.494	41	.036		
	Total	14.336	43			

a. Dependent Variable: Pertumbuhanekonomi

b. Predictors: (Constant), Belanjadaerah, PAD

Sumber: Output SPSS versi 27, (data diolah), 2025

Tabel diatas menunjukkan hasil uji signifikansi simultan (uji F) pada model regresi berganda dengan variabel dependen Pertumbuhan Ekonomi dan variabel prediktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah. Nilai F hitung sebesar 176.215 dengan tingkat signifikansi $p < 0.001$. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan signifikan secara statistik. Hal ini berarti variabel independen yang digunakan, yaitu Pandapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Selain itu, perbandingan nilai *Sum of Squares Regression* (12.842) dengan *Sum of Squares Total* (14.336) menunjukkan bahwa sebagian besar variasi pada pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan oleh model regresi yang digunakan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar model (residual sebesar 1.494).

4. Uji Koefisien Determinasi (R)

Uji Koefisien determinasi (R^2) dilakukan untuk melihat seberapa besar kontribusi variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Belanja Daerah (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y). Nilai koefisien determinasi ditentukan dengan *nila Adjusted R Square*. Nilai *Adjusted R-Square* semakin mendekati satu, maka variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel

dependen. Berikut disajikan hasil perhitungan koefisien determinasi (R^2) menggunakan bantuan aplikasi SPSS:

Tabel 3. Hasil uji Determinasi (R^2)

Model Summary^b									
Model R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			df1	df2	Sig. F Change
				R Square Change	F Change				
1	.946 ^a	.896	.19089	.896	176.215	2	41	.000	

a. Predictors: (Constant), Belanjadaerah, PAD

b. Dependent Variable: Pertumbuhanekonomi

sumber: Output SPSS versi 27 (data diolah),2025

Berdasarkan hasil pengujian koefisien determinasi (R^2) pengaruh variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) (X_1), Belanja Daerah (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y), diketahui nilai R-Square adalah sebesar 0,896. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mempengaruhi variasi perubahan variabel pertumbuhan ekonomi sebesar 89,6%,sedangkan sisanya sebesar 10,4% dipengaruhi oleh variabel lain diluar variabel dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator utama yang mencerminkan peningkatan kapasitas suatu negara dalam menghasilkan barang dan jasa. Dalam konteks pembangunan nasional, pertumbuhan ekonomi bukan hanya menjadi tujuan, melainkan juga sarana penting untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas. Menurut Todaro and Smith (2015) pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output riil per kapita dalam jangka panjang, yang mencerminkan kemajuan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, ketimpangan Pembangunan antar wilayah juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tersebut. Mulyani et al. (2021),terdapat perbedaan perkembangan yang signifikan dan berkelanjutan antara Wilayah Indonesia Barat (KBI) dan Wilayah Indonesia Timur (KTI). Hal ini terbukti dalam dominasi provinsi-provinsi di Jawa dan Sumatera.

Dalam kerangka otonomi daerah, salah satu indikator penting dari keberhasilan desentralisasi fiskal adalah kemandirian fiskal daerah. Kemandirian ini tercermin dari

kemampuan daerah dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan secara mandiri untuk membiayai kebutuhan pembangunan serta pelayanan publik. Dalam konteks ini, Pendapatan Asli Daerah (PAD) memegang peran sentral. PAD mencerminkan seberapa besar suatu daerah mampu mengurangi ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. PAD juga merupakan cermin dari kualitas tata kelola pemerintahan daerah, kapasitas ekonomi lokal, serta kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban fiskalnya. Oleh karena itu, penguatan PAD menjadi salah satu fokus utama dalam pengembangan kapasitas fiskal daerah. Siregar (2023) mengemukakan bahwa sebagian besar komponen Pendapatan Asli Regional berkontribusi secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Begitu juga dengan belanja daerah, dalam sistem desentralisasi fiskal, belanja daerah menjadi salah satu instrumen utama dalam mewujudkan otonomi daerah yang efektif. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola dan membelanjakan anggarannya guna meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, serta mendorong kesejahteraan masyarakat di wilayahnya. Belanja daerah tidak hanya berfungsi sebagai alat pengeluaran, melainkan juga sebagai bentuk intervensi kebijakan yang mencerminkan prioritas dan arah pembangunan daerah. Dalam konteks peraturan perundang-undangan di Indonesia, belanja daerah diatur dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pengelolaan belanja daerah juga merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa belanja daerah merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang digunakan untuk membiayai tugas-tugas pemerintahan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hipotesis 1 (satu) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dihimpun dan dikelola oleh pemerintah daerah, maka semakin tinggi pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang dapat dicapai. Secara teori, Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meningkat memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pembangunan. Dengan PAD yang tinggi, pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer dari pusat, tetapi memiliki fleksibilitas untuk merancang kebijakan pembangunan berbasis kebutuhan lokal (*place-based policy*). Hal ini mendukung argumen dalam teori pertumbuhan endogen, yang menyatakan bahwa investasi dalam infrastruktur, pendidikan, dan inovasi (yang didanai oleh PAD) merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi jangka Panjang. Hasil ini didukung oleh (Siregar 2023), Siregar et al. (2023), Novia (2023) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh

positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan berbeda dengan Lisandri, Rizani, and Syam (2017) yang menyatakan bahwa PAD merupakan indikator produktivitas dan kemandirian lokal, dampaknya terhadap belanja modal dan pertumbuhan ekonomi tidak signifikan karena potensi inefisiensi. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah di Kawasan Timur Indonesia khususnya pada propinsi yaitu Nusa Tenggara Timur, Maluku, Papua dan Papua barat, untuk melakukan diversifikasi sumber PAD berbasis potensi lokal (pariwisata, perikanan, energi terbarukan), Penguatan SDM dan sistem informasi perpajakan daerah, Pengawasan ketat terhadap penggunaan PAD agar efektif dan berdampak, mendorong kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hipotesis 2 (dua) dalam penelitian ini menemukan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kawasan Timur Indonesia. Hal ini sejalan dengan penelitian Siregar et al. (2023). Temuan ini menegaskan bahwa pengeluaran publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah bukan sekadar instrumen administrasi, tetapi merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi lokal, khususnya di wilayah yang secara historis mengalami ketertinggalan seperti kawasan timur Indonesia. Belanja daerah, terutama dalam bentuk belanja modal, mampu menciptakan permintaan agregat, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan konektivitas dan daya saing wilayah. Ketika pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk membangun jalan, pasar, jembatan, fasilitas kesehatan, atau pusat pelatihan kerja, maka kegiatan ekonomi akan terdorong secara langsung maupun tidak langsung. Dalam konteks kawasan timur Indonesia yang memiliki tantangan geografis, infrastruktur yang minim, dan keterbatasan akses layanan dasar, belanja publik yang efektif menjadi elemen vital untuk mendorong aktivitas ekonomi dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Hipotesis 3 (tiga) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Hasil penelitian ini di dukung oleh Siregar et al. (2023).

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif signifikan, meskipun kontribusinya relatif kecil. Begitu juga dengan Belanja Daerah berpengaruh positif signifikan dan merupakan variabel paling dominan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Sedangkan secara simultan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian ini menegaskan pentingnya peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai sumber kemandirian fiskal dan

belanja daerah sebagai instrumen utama pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, keseimbangan antara peningkatan PAD dan pengelolaan belanja daerah yang efektif sangat diperlukan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah khususnya di Kawasan Indonesia Timur.

REFERENSI

- Bahl, Roy. 1999. *International Studies Program Implementation Rules for Fiscal Decentralization*. Atlanta.
- Fitriyani, Ika, Ismawati, Nurul Wahida, and Asmini. 2020. "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sumbawa Tahun 2012-2018." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 8(2):116–26.
- Jannah, Mutiatul, K. Kurniawansyah, and I. Ismawati. 2022. "Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Sumbawa Barat." *Jurnal Ekonomi & Bisnis* 10(3):341–49. doi: 10.58406/jeb.v10i3.1045.
- Lisandri, Fahmi Rizani, and Akhmad Yafiz Syam. 2017. "Pengaruh Pad Dan Dau Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan." 7(1):111–22.
- Mulyani, Eka Sri, Sudarman Sudarman, and Ratna Fitri Astuti. 2021. "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2001-2020." *Educational Studies: Conference Series* 1(2). doi: 10.30872/escs.v1i2.894.
- Novia, Nopia Indah Sari Simamora. 2023. "Influence of Regional Original Income on Economic Growth in the Province of North Sumatera." *Outline Journal of Economic Studies* 2(1):17–23. doi: 10.61730/ojes.v2i1.31.
- Oates, Wallace E. 1999. "An Essay on Fiscal Federalism." *Fiscal Federalism and European Economic Integration* XXXVII(September):13–47. doi: 10.4324/9780203987254.
- Pahlevi, Merita, Madya Raharja, Sukma Hadi, Azharianto Latief Baroto, Aditya Widya Permana, Winarso Tri Rahayu, Ferry Prasetya, Tengku M. Chalil, and Tiara Juniar Soewardi. 2021. *Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Indonesia*. Jakarta: Badan Kebijakan Fiskal.
- Romer, Paul M. 1994. "The Origins of Endogenous Growth." *Journal of Economic Perspectives* 8(1):3–22.
- Setiawan, and A. F. Aritenang. 2019. "The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Performance in Indonesia." in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*. Vol. 340. Institute of Physics Publishing.
- Siregar, Ine Febrianti, Rifka Fauziah Batubara, Ruth Septaria Hutapea, and Sinta Rahmawati. 2023. "Analisis Pengaruh Pendapatan Daerah Dan Belanja Daerah

- Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Tapanuli Selatan (2011-2022).” *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi Dan Manajemen* 3(3):390–99. doi: 10.54951/sintama.v3i3.668.
- Siregar, Syahdan Abdul Haris. 2023. “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2003-2021.” *Journal of Development Economic and Social Studies* 2(1):194–204. doi: 10.21776/jdess.2023.02.1.18.
- Soleh, Ahmad. 2015. “Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia.” *Ekombis Review* 2(2).
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2015. *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke 7. pearson.
- Undang-Undang No 23 Tahun 2014. n.d. *Pemerintah Daerah*.
- Wiguna, Rochmah Utaria, Lucia Rita Indrawati, and Gentur Jalunggono. 2021. “Pengaruh Belanja Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Provinsi Banten.” *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 3(4):917–38.